L k j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA
2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pelaporan instansi yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan, dan merupakan implementasi dari Rencana Srategis. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan. Dengan demikian melalui LKjIP ini diharapkan akan dapat menyajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja Kecamatan Umbulharjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Selain itu laporan ini juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran dan uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

CAMAT UMBULHARJO

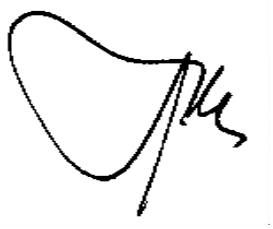

Drs. RUMPIS TRIMINTARTA

NIP. 19640501 198602 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyusun laporan sebagaimana kita sebuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut memuat tentang perencanaan, pelaksanaan dan realisasi sasaran perangkat daerah yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), serta dianalisa secara diskriptif kuwalitatif tentang keberhasilan dan kegagalan atas capaian realisasi yang sudah ditargetkan. Selain itu juga dipaparkan pula tentang perjanjian kinerja dan inovasi perangkat daerah sebagai faktor pendukung sasaran utama perangkat daerah.

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta mempunyai 1 (satu) sasaran utama yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2017-2022 yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan. yaitu ***TINGKAT PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KECAMATAN UMBULHARJO MENINGKAT***. Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu ***Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo,*** dengan metode penilaian mandiri perkembangan di 7 (tujuh) kelurahan. Pada tahun 2020 ini, target nilai yang harus diperoleh sebesar 380,5

Untuk mencapai target sasaran perangkat daerah, Kecamatan Umbulharjo menerapkan strategi program dan kegiatan yaitu ***Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo.*** Strategi program tersebut mempunyai 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Angka Swadaya Murni Masyarakat. Target keberhasilan di tahun 2020 adalah nilai 81 untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan 1.101.518.000 rupiah untuk angka swadaya murni masyarakat.

Pelaksanaan strategi program dan kegiatan membutuhkan modal (INPUT) yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan pendukung. Input inilah yang akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (OUTPUT), yang kemudian

akan memberikan manfaat dan dampak perubahan (OUTCOME) sesuai dengan visi, misi, tujuan perangkat daerah. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Umbulharjo tahun 2020 mencapai 6.124.232.152 rupiah dengan 4 (empat) program dan 16 kegiatan.

Pengukuran dampak dari keberhasilan sebuah program dan kegiatan perlu dikaji dari banyak sektor, dan menjadi ranah kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sudah direncanakan oleh Kecamatan Umbulharjo akan terlihat dampaknya secara langsung di masyarakat, yaitu bahwa keberdayaan masyarakat meningkat, artinya setiap program dan kegiatan bisa menjadi penggerak atau motivasi bagi masyarakat untuk memberdayakan diri dan lingkungan sehingga sasaran perangkat daerah akan tercapai.

Hasil evaluasi dari penilaian dan pencapaian target selama tahun 2017-2020 dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan/sklill dan produktifitas sumber daya manusia masih perlu diupayakan, agar INPUT menjadi kuat.
2. Pemanfaatan capaian target dari sasaran masih perlu difokuskan untuk mendukung tujuan perangkat daerah (OUTCOME)
3. Masih diperlukan pengembangan potensi wilayah melalui inovasi-inovasi mandiri masyarakat yang juga mendukung tujuan perangkat daerah

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Umbulharjo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Visi, Misi dan Sasaran Kecamatan Umbulharjo 2

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Umbulharjo 2

1.3 Susunan Organisasi Kecamatan Umbulharjo..... 5

1.4 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Umbulharjo..... 6

1.5 Isu Strategis 8

1.6 Sumberdaya Manusia 11

1.7 Sarana dan Prasarana 12

1.8 Keuangan 13

1.9 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 Perencanaan Strategis 14

2.2 Indikator Kinerja Utama 20

2.3 Strategi Program dan Kegiatan 21

2.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 22

2.5 Alokasi Anggaran 24

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Umbulharjo 26

3.2 Analisa Kinerja Sasaran Program Kecamatan Umbulharjo 30

3.3 Capaian Kinerja dan Analisa Sasaran Program 37

3.4 Capaian dan Analias Keuangan 42

3.5 Inovasi 47

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP 49

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Daftar Tabel, Gambar, dan Grafik

Gambar Peta Wilayah 3

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 4

Tabel 2 Jumlah RT, RW dan kampung Kecamatan Umbulharjo 4

Grafik 1 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Anjab 11

Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Kelamin 11

Tabel 3 Daftar Sarana Prasarana Kecamatan Umbulharjo 12

Tabel 4 Program dan Kegiatan Anggaran 13

Gambar 2 Rumusan Sasaran dan Strategi Program 17

Tabel 5 Program/Kegiatan Pendukung RPJMD 18

Tabel 6 Target pada Sasaran Strategis Perangkat Daerah 20

Tabel 7 Target pada Sasaran Program 20

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama 21

Tabel 9 Strategi Program dan Kegiatan 22

Gambar 3 Perjanjian Kinerja Strategis Perangkat Daerah 23

Gambar 4 Perjanjian Kinerja Eselon III Camat 23

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Strategis 24

Tabel 11 Anggaran Sasaran Strategis 25

Tabel 12 Hasil Penilaian Perkembangan Kelurahan Tahun 2020 28

Tabel 13 Instrumen Analisis Perkembangan Kelurahan 28

Grafik 3 Nilai Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan 30

Tabel 14 Prosentase Capaian Kinerja Strategis 30

Tabel 15 Jumlah Pelaku Kuliner 31

Tabel 16 Jumlah Pembinaan Kelompok Pengrajin 32

Tabel 17 Jumlah Lokasi Lorong Sayur 33

Tabel 18 Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 34

Gambar 5 sasaran Program 37

Tabel 15 Laporan Survey Kepuasan masyarakat 39

Tabel 16 Perbandingan Capaian Sasaran Profram 40

Tabel 17 Target Swadaya Murni Masyarakat 41

Grafik 4 Anggaran Belanja Langsing 43
Tabel 18 Anggaran Program dan Kegiatan 43
Grafik 5 Perbandingan Anggaran..... 44
Grafik 6 Realisasi Anggaran Strategi..... 45
Tabel 19 Realisasi Capaian Kinerja Anggaran 46

BAB 1

PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020 yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KecamatanUmbulharjo Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Umbulharjo

2. Mendorong Kecamatan Umbulharjo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Umbulharjo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Umbulharjo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Visi Misi dan Sasaran Perangkat Daerah

KecamatanUmbulharjosecaraspesifiktidakmenentukanvisisendiri, namunmendukung dan sejalandenganvisiPemerintah Kota Yogyakarta yaitu : "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagaikotanyamanhuni dan pusatpelayananjasa yang berdayasainguntukkeberdayaanmasyarakatdenganberpijak pada nilaikeistimewaan."

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Umbulharjo

Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu kecamatan yang terletak pada bagian selatan Kota Yogyakarta dengan ketinggian 113 meter dari permukaan laut dan Luas Wilayah ± 811,4800 hektar. Batas wilayahnya meliputi :

1. Sebelah Barat : Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Pakualaman
2. Sebelah Timur : Kec.Kotagede, Kec. Banguntapan Kab.Bantul
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah Utara : Kecamatan Gondokusuman

Gambar 1. Peta Wilayah

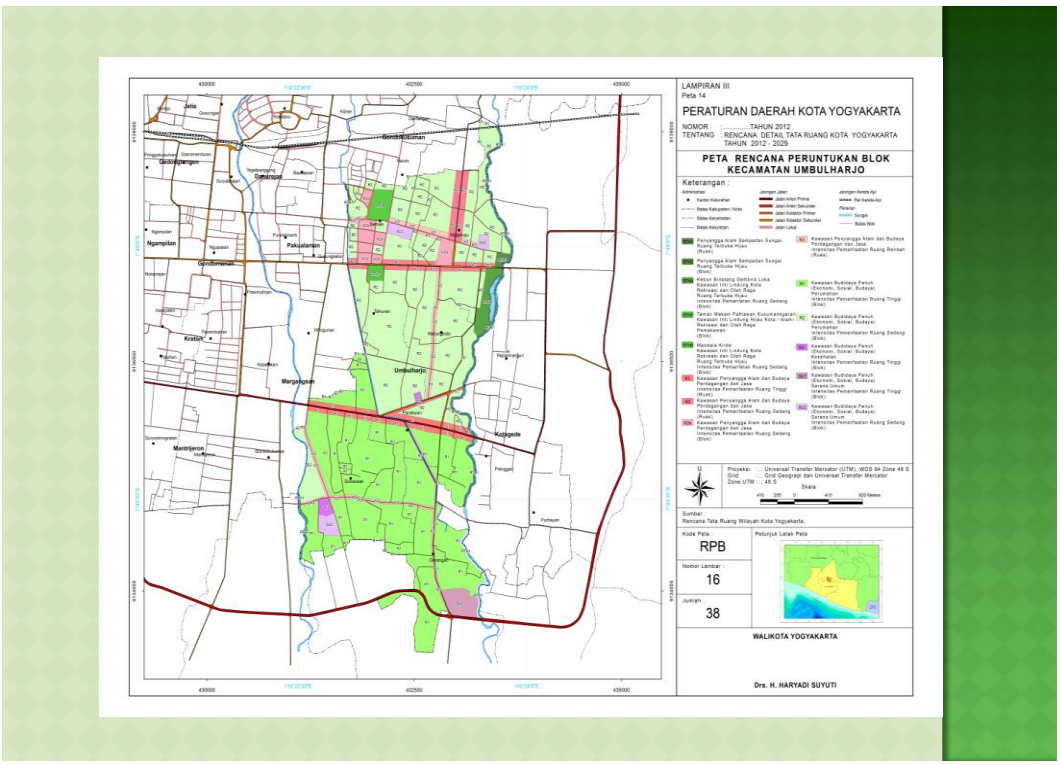

Wilayah Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah dataran rendah dengan peruntukan lahan sebagian besar sebagai wilayah permukiman penduduk (60%). Selain itu peruntukan lahan untuk pertanian perkebunan (20 %) dan selebihnya untuk industri, pasar, perkantoran, fasilitas pendidikan, serta fasilitas umum masyarakat (20 %).

Kecamatan Umbulharjo memiliki topografi sungai yaitu :

1. Sungai Gajah Wong, melewati Kelurahan Muja-muju, Warungboto, Pandeyan dan Giwangan
2. Sungai Manunggal, melewati Kelurahan Semaki, Tahunan, Pandeyan dan Sorosutan
3. Sungai Code, melewati Kelurahan Sorosutan

Ketiga sungai tersebut merupakan modal alam yang sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya yaitu sungai menjadi potensi pariwisata lokal.

Gambaran umum demografi Kecamatan Umbulharjo, jumlah penduduk pada akhir Desember 2020 sebanyak 70.431 jiwa, yang terbagi menjadi jumlah penduduk laki-laki 34.498 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 35.933 jiwa. Sedangkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau sex ratio yaitu 96, artinya bahwa pada 100 penduduk laki-laki, akan terdapat 96 penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan benar bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Semaki	2.521	2.665	5.186
2	Muja-muju	5.389	5.559	10.948
3	Tahunan	4.525	4.659	9.184
4	Warungboto	4.471	4.779	9.250
5	Pandeyan	5.992	6.222	12.214
6	Sorosutan	7.639	7.983	15.622
7	Giwangan	3.961	4.066	8.027
	TOTAL	34.498	35.933	70.431

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Bulan Desember 2020)

Wilayah Kecamatan Umbulharjo terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan,19 kampung, 87 Rukun Warga (RW) dan 343 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2

Jumlah Kelurahan, Kampung, RW dan RT Kecamatan Umbulharjo

NO	KELURAHAN	RW	RT	KAMPUNG
1	Semaki	10	34	3
2	Muja-muju	12	55	3
3	Tahunan	12	50	3
4	Warungboto	9	38	3
5	Pandeyan	13	52	2
6	Sorosutan	18	70	2
7	Giwangan	13	44	3
	TOTAL	87	343	19

1.3. Susunan Organisasi Kecamatan Umbulharjo

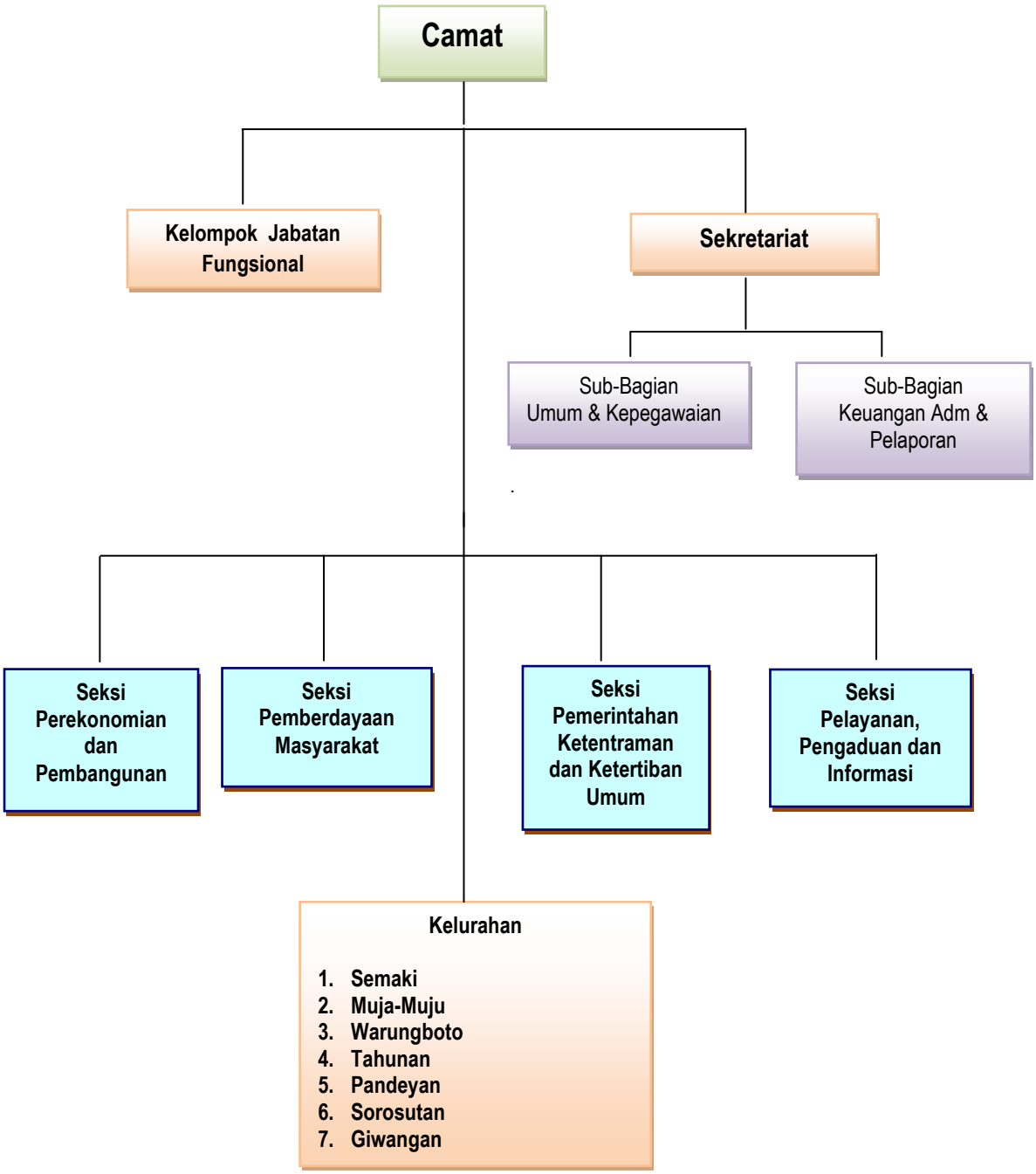

1.4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Umbulharjo

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, maka kedudukan Kecamatan Umbulharjo adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi yaitu :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
g. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
h. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yoyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (terlampir lampiran Perwal), urusan pemerintahan dimaksud meliputi:

a. urusan pemerintahan umum
b. urusan pendidikan
c. urusan kesehatan
d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. urusan sosial
g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
h. urusan lingkungan hidup
i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
j. urusan kebudayaan
k. urusan perdagangan.

Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan diselenggarakan kecamatan meliputi aspek :

a. perizinan
b. rekomendasi
c. koordinasi
d. pembinaan
e. pengawasan
f. fasilitasi
g. penetapan
h. mediasi
i. penyelenggaraan
j. kewenangan lain

Kewenangan lain yang dimaksud pada huruf j tersebut dilaksanakan oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan meliputi :

a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
b. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis juga dapatdiartikansebagaisuatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi.Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan / bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Identifikasi isu strategis Kecamatan Umbulharjo yang tertuang dalam Rencana Strategis perangkat daerah kurun waktu lima tahunan dari 2017 sampai dengan 2022 antar lain :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh PerangkatDaerah Kecamatan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.Perbaikan dan peningkatan kualitas dalamsistem pelayanan menjadi hal pokok yang harus dilakukan. Model pelayanan yang gampang, mudah dipahami alurnya, simpel, dan gratis merupakan sumber inovasi yang selalu digali oleh pemerintah.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Hal itu sejalan dengan amanat presiden melalui Undang-undangnomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan aturan pelaksananya yaitu Permendagri nomor: 4tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

b. **Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Sejalan dengan bentuk topografi Kecamatan Umbulharjo yang didominasi oleh bentuk masyarakat perkotaan dan juga jumlah penduduk yang besar maka pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama pembangunan wilayah. Jumlah

penduduk besar merupakan permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan, karena di dalam jumlah penduduk yang besar akan ditemukan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, ketertiban, dan budaya. Isu sosial jelas akan nampak pada tingkat kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja, penataan lingkungan kumuh, dan isu-isu sosial yang menyangkut gender. Isu sosial ekonomi akan terlihat pada ketimpangan pendapatan penduduk, ketersediaan ruang usaha, ketersediaan modal usaha, kemudahan pengurusan izin usaha, sertifikasi produk dan pembinaan serta peningkatan ketrampilan. Kenudian di dalam isu ketertiban akan terlihat pada intensitas pelanggaran peraturan daerah yang kemudian mempengaruhi peran kecamatan dalam upaya pembinaan ketertiban itu sendiri.

Isu budaya yang akan terlihat pada intensitas pelestarian budaya sebagai implemetasi dari perwujudan nilai keistimewaan Kota Yogyakarta. Bahwa krisis budaya tidak hanya pada pelestarian adat tradisi budaya, namun lebih pada budaya perilaku masyarakat yang mulai bergeser dari nilai keistimewaan. Budaya perilaku masyarakat inilah yang juga menjadi isu utama pembangunan sumber daya manusia.

c. **Siaga Bencana Banjir**

Sesuai topografi Kecamatan Umbulharjo, yang dilintasi 2 (dua) aliran sungai besar yaitu Sungai Gajah Wong dan Sungai Code, merupakan isu strategis penataan lingkungan sekaligus kesiapsiagaan bencana. Sungai tidak lagi menjadi ancaman krisis sosial, namun harus dikembangkan menjadi sumber penyelesaiaan permasalahan sosial masyarakat. Kawasan kumuh bantaran sungai, itu yang menjadi tantangan bagaimana kita dapat mengembangkan dan menata kawasan bantaran sungai menjadi bersih, tertata dan bahkan menjadi daya tarik pengembangan wisata lokal, yang akan berdampak pada solusi terhadap isu sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

d. **Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan berbasis kewilayahan merupakan isu strategis dimana aspek kewilayahan inilah yang menjadi fator pendorong, melalui pengembangan swadaya masyarakat dan juga inovasi-inovasi mandiri dari masyarakat.

Kampung merupakan suatu wilayah yang dibentuk untuk menjadi basis pembangunan di Kota Yogyakarta. Kecamatan Umbulharjo mempunyai 19 (sembilan belas) kampung yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan. Pemetaan potensi dan

karakteristik masyarakat menjadi penting, sehingga pengembangan kampung tidak menjadi salah.

e. **Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan**

Isu gender menjadi penting, manakala realitas jumlah penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu modal pembangunan, maka pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunanan.

Selain isu gender, isu yang tidak kalah penting adalah keberadaan penyandang disabilitas. Realitas yang ada bahwa sekitar 3.400 penduduk Kota Yogyakarta sebagai penyandang disabilitas, perlu mendapat perhatian khusus sebagai bagian sumber daya manusia. Pengembangan kaum difabel yang tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan bahkan pelaku pembangunan harus diupayakan maksimal. Salah satu wujud uapaya itu adalah dibentuk Forum Kecamatan Inklusi yang memiliki peran mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Pengurus Forum Kecamatan Inklusi terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, perwakilan penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lain.

f. **Keterbukaan Informasi Publik**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badanpublik untuk dapat menyajikan informasi yang menjadi hak publik. Suatu informasi menjadi sangat penting dan berperan dalam meberikan data-data akurat dari rencana-rencana pemerintah dan capaian-capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan, dengan harapan adanya featback dari masyarakat untuk berperan mengawasi jalannya pembangunan.

1.6. Sumber Daya Manusia

Jumlah dan distribusi pegawai di kecamatan dan kelurahanmasihbelumsesuaidengananalisisjabatan. Keterisiananjabkurang dari 50% sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah, apalagi tidak didukung oleh kemampuan kompetensi dari ASN itu sendiri, sehingga dapat dikatakan sumberdaya manusia dari segi kuantitas masih kurang. Namun demikian keterbatasan sumberdaya manusia ini jangan sampai menjadi faktor dominan penghambat kinerja kecamatan.

Grafik 1

Jumlah Pegawai keadaan Desember 2020 Kecamatan Umbulharjo berdasarkan pemenuhan Analisis Jabatan

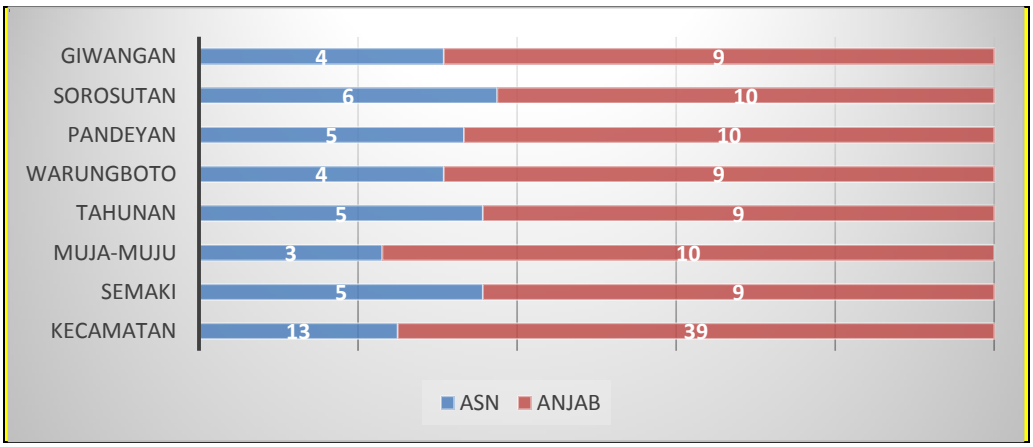

Grafik 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

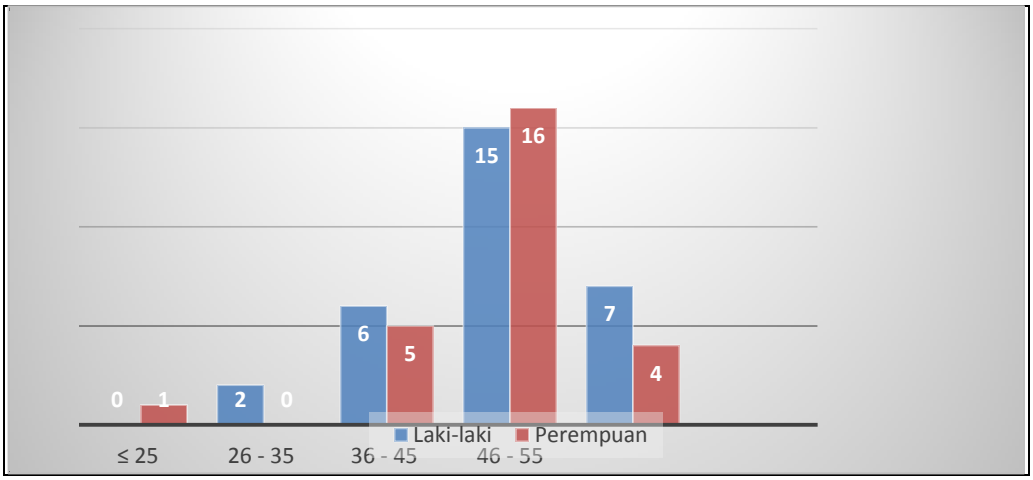

Berdasarkanusia dan jenis kelamin, sumber daya manusia di Kecamatan Umbulharjo masih didominasi oleh perempuan dan usia berkisar pada 46–55 tahun. Usia yang sebenarnya sudah mengalami proses penurunanproduktifitas, dikarenakan masa kerja yang rata-rata sudah mencapai 20 tahun. Namun demikian Karena tuntutan kewajiban dari ikatan kedinasan, maka produktifitas tetap harus dibangun sebagai modal utama pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran perangkat daerah.

1.7. Sarana dan Prasarana

Tabel 3

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

SARPRAS	JUMLAH	KONDISI			KET
		Lengkap	Cukup	Kurang	
Gedung utama	1 unit	√			
Gedung pendukung	1 unit	√			Pendopo
Sarana pendukung pelayanan	2 unit		√		• Tempat parkir pelayanan masih belum beratap. • Ruang Merokok
Ruang pelayanan	1 ruang	√			Termasuk ruang bermain anak
Ruang rapat	1 ruang		√		Masih kurang penataan
Ruang laktasi	1 ruang	√			
Ruang perpustakaan	1 ruang		√		
Ruang arsip	1 ruang			√	
Ruang kerja	12 ruang		√		Masih kurang penataan
Komputer dan printer			√		
Meja dan kursi kerja			√		
Kendaraan dinas roda 4	1 unit	√			Baru
Kendaraan dinas roda 2			√		
Kendaraan operasional roda 3	3 unit		√		2 KTB dan 1 Operasional

1.8. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2020 Kecamatan Umbulharjo mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 6.124.232.152,- yaitu belanja langsung kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan sasaran strategis yang terdiri dari dari 4 (empat) program dan 16 kegiatan.

Tabel 4
Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.125.000
		Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.308.123.937
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PemeliharaanRutin/Berkala Gedung /BangunanKantor	85.878.575
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.221.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.117.000
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	60.098.000
		Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	28.889.820

No	Program	Kegiatan	Anggaran
		Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	89.276.000
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan BudayaMasyarakat Kelurahan Giwangan	619.253.000
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah danPembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	601.892.820
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	554.051.000
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	574.315.000
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	615.087.000
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan MujaMuju	560.573.000
		PenyelenggaraanPembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	713.126.000
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	178.195.000

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Umbulharjo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada rencana strategismelalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana strategistersebut merupakan rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Sejalan dengan hal itu Kecamatan Umbulharjo telah membuat dan menetapkan rencana strategis (RENSTRA) untuk peiode 2017 – 2022.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo 2017-2022

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun.Renstra Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, bahwa perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Umbulharjo yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022.

Gambar 2
Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan
dan sasaran Kecamatan Umbulharjo

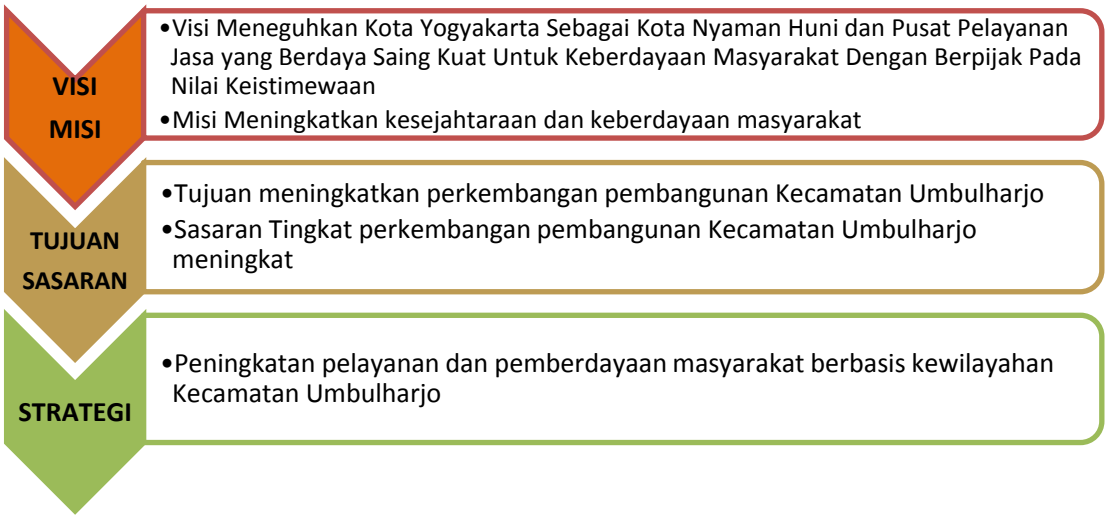

Arah Kebijakan

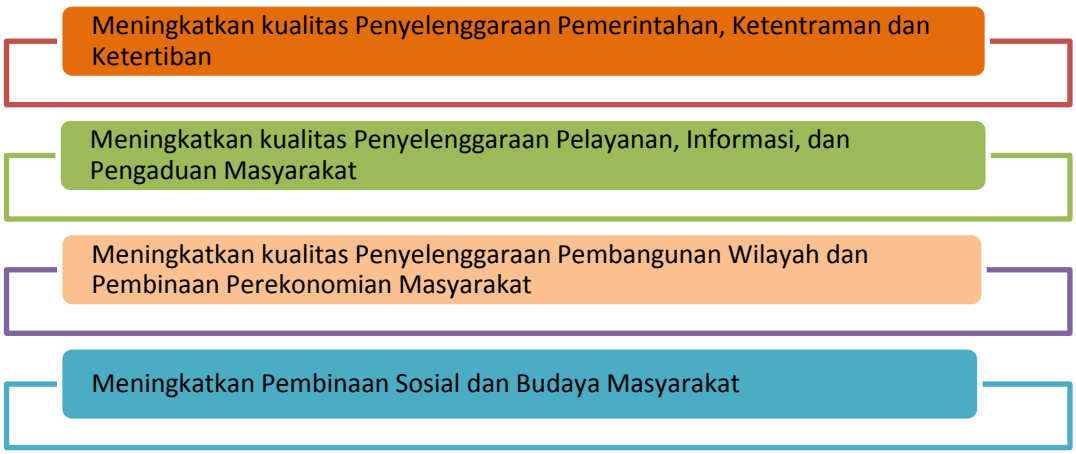

Strategi dan arah kebijakan yang menjadi dasar pencapaian sasaran Kecamatan Umbulharjo tersebut, tentunya juga mendukung misi, arah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat
2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya
5. Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan
6. Membangun Sarana dan Prasara Publik dan Permukiman
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

SASARAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Ada 13 (tiga belas) sasaran dalam RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Kecamatan Umbulharjo secara langsung mendukung 12 (dua belas) sasaran. Berikut ini tabel data kegiatan yang mendukung RPJMD Kota Yogyakarta.

Tabel5

Perogram/Kegiatan Pendukung Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta

No	Sasaran RPJMD	Kegiatan Pendukung Sasaran
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	1. Pelatihan ketrampilan 2. Pelatihan kerajinan 3. Pelatihan managemen usaha 4. Pelatihan perikanan dan pertanian 5. Pelatihan kuliner 6. Pembinaan seni dan budaya 7. Pembinaan pariwisata 8. Fasilitasi lembaga wilayah 9. Fasilitasi kegiatan dari program berbasis kampung 10. Pembinaan disabilitas 11. Pembinaan anak dan remaja
3	Ketahanan Pangan Meningkat	1. Pelatihan budidaya ikan lele cendol 2. Pelatihan budidaya tanaman sayuran 3. Pelatihan budidaya tanaman buah
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	1. Pelatihan ketrampilan 2. Pelatihan kerajinan 3. Pelatihan managemen usaha 4. Pelatihan perikanan dan pertanian 5. Pelatihan kuliner

5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	1. Pembinaan melalui program dalam PKK 2. Pembinaan UMKM 3. Pembinaan PKL
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	1. Pembinaan Linmas kelurahan kecamatan 2. Koordinasi dan monitoring tramtib 3. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Lomba kamling
7	Kualitas Pendidikan Meningkat	1. Kemitraan dengan PKBM 2. Fasilitasi kegiatan JBM
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	1. Pembinaan Lansia produktif 2. Fasilitasi Kelurahan Siaga 3. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui Yandu
9	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya meningkat	1. Rintisan Kelurahan Budaya 2. Pembinaan kesenian dan budaya 3. Gelar, Gebyar dan festival budaya 4. Pelatihan kerajinan batik jumputan
10	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	1. Pembinaan lingkungan melalui lomba kampung bersih dan hijau 2. Program lorong sayur 3. Pembangunan SPAH 4. Penataan kawasan kumuh bantaran sungai 5. RTHP 6. Pembentukan Jumantik Mandiri 7. Kawasan Bebas Asap Rokok
11	Infrastruktur Wilayah Meningkat	1. Pemeliharaan jalan melalui konblokisasi 2. Pemeliharaan sarana prasara fasum 3. Pemeliharaan SAH 4. Pemeliharaan PJU lingkungan 5. Pemeliharaan RTHP
12	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	1. Pelayanan terpadu kecamatan 2. Sarana pelayanan melalui akun JSS 3. Pelayanan inforasi dan pengaduan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 target sasaran dan program Kecamatan Umbulharjo mengalami perubahan. Penyesuaian indikator pada sasaran tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni masyarakat dikarenakan formula untuk mengukur sudah tidak relevan lagi. Tingkat swadaya masyarakat diambil dari prosentase swadaya masyarakat yang menyertai hibah stimulan LPMK, dan pada tahun 2020 hibah stimulan LPMK tidak ada, sehingga penyesuaian menjadi angka swadaya murni masyarakat, dengan dasar penghitungan target 10% dari pagu dana kelurahan.

Tabel 6
Target Sasaran Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tingkat Kinerja Sasaran Tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	372	379,5	380,5	381	381,5

Tabel 7
Target Program Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020

Program	Indikator Sasaran Program	Tingkat Kinerja Program Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survey Kepuasan Masyarakat	80	80,25	80,50	81	81,50	82
	Tingkat swadaya masyarakat	5%	25%	25%	-	-	-
	Angka Swadaya Murni Masyrakat	-	-	-	1.101.518.000	1.230.243.000	1.377.869.000

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dokumen perencanaan selanjutnya setelah Renstra yaitu Indikator Kinerja Utama atau disebut IKU. Perumusan IKU perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di LingkunganPemerintah Kota Yogyakarta

Tujuanditetapkannya IKU yaitu :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Tabel8

IKU KecamatanUmbulharjo

No.	SasaranPerangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Giwangan ditambah Kel.Sorosutan ditambah Kel. Pandean ditambah Kel. Warungboto ditambah Kel. Tahunan ditambah Kel. Muja-muju ditambah Kel. Semaki dibagi tujuh

2.3. Strategi Program dan Kegiatan

Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka panjang, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kecamatan Umbulharjo mempunyai satu strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya pembangunan berbasis kewilayahan yaitu ***Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan.***Sesuaidengantugas dan fungsikecamatansebagaipenyelenggarapemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, maka strategi tersebutsudahsesuaisebagaisatucarauntukmencapaitujuan.

Tabel9

Strategi program dan kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan meningkat	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulahrjo 2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 4. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 5. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 6. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 7. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 8. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 9. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 10. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 11. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonominan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

2.4. Perjanjian Kinerja Strategis Perangkat Daerah

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dariwalikota kepadac amat selaku pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah

komitmen dan kesepakatan antara walikota sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Gambar 3

Perjanjian Kinerja Strategis Kecamatan UmbulharjoTahun 2020

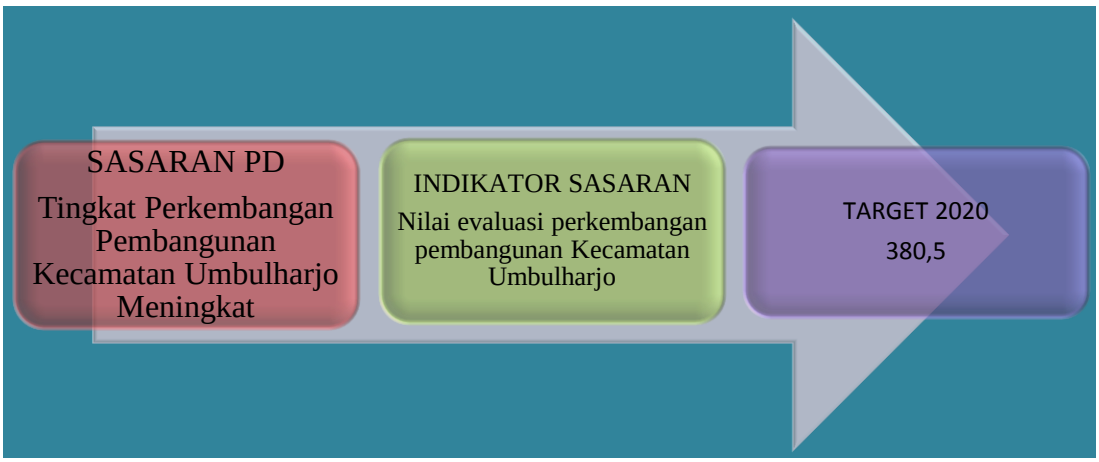

Gambar 4

Perjanjian Kinerja Eselon III CamatTahun 2020

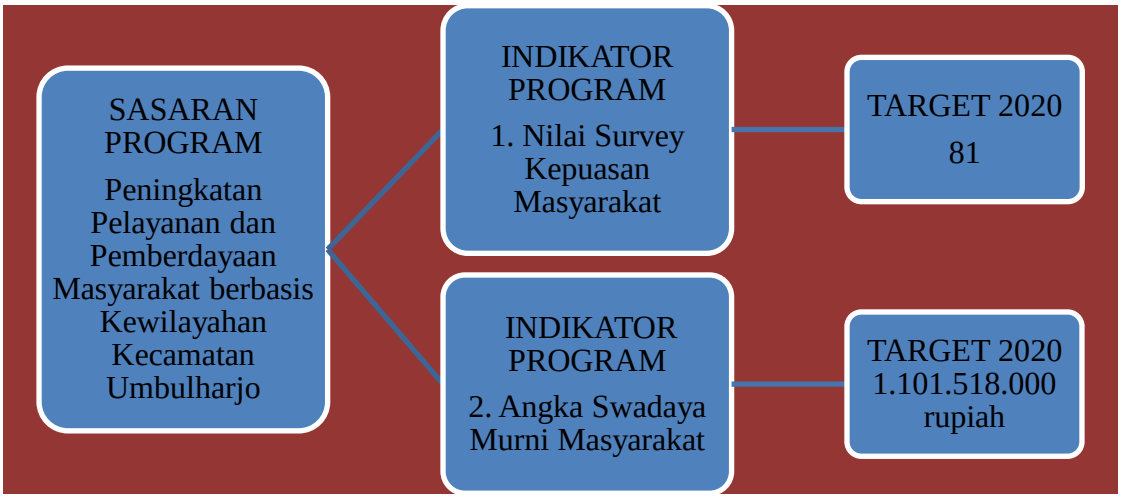

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Umbulharjo di tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 27Januari 2020 sebagaimana terlampir dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 12 November 2020 sehubungan adanya perubahan anggaran dan kegiatan Kecamatan Umbulharjo.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian KinerjaKecamatanUmbulharjoTahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10

PerjanjianKinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat**	**Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo**		380,5

2.5. ANGGARAN

Perencanaan kinerja tidak lepas dari rencana penganggaran, karena anggaran adalah salah satu modal utama dan penting terhadap capaian atau terlaksananya suatu program dan kegiatan. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menggunakan model penganggaran ***Money Follow Program*** yaitu pendekatananggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan skala prioritas serta memberikan dampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebut sebagai

anggaran berbasis kinerja, dimana dalam satu kegiatan anggaran sudah mencakup *input*, *output, outcome* bahkan sampai pada *benefit*

Anggaran Kecamatan Umbulharjo tahun 2020 sebesar Rp. 6.124.232.152,00. Anggaran itu termasuk dalam indikator pendukung terlaksananya sasaran kinerja Kecamatan Umbulharjo melalui strategi program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo. Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa 75,03% anggaran diperuntukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 11
Peruntukan Anggaran Berdasar Sasaran Strategis

No	Sasaran Program	Anggaran	Prosentase (%)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.402.248.937	22,90	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	124.099.575	2,02	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	3.117.000	0.05	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	4.594.766.640	75,03	Pendukung sasaran strategis
	JUMLAH	6.124.232.152	100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Kecamatan Umbulharjo telah berupaya maksimal untuk menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Umbulharjo tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada indikator sasaran dengan realisasinya. Ada 2 (dua) indikator yang akan dibandingkan pada laporan ini, yaitu :

1. Indikator pada sasaran perangkat daerah
2. Indikator pada program perangkat daerah

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Umbulharjo

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Umbulharjo adalah

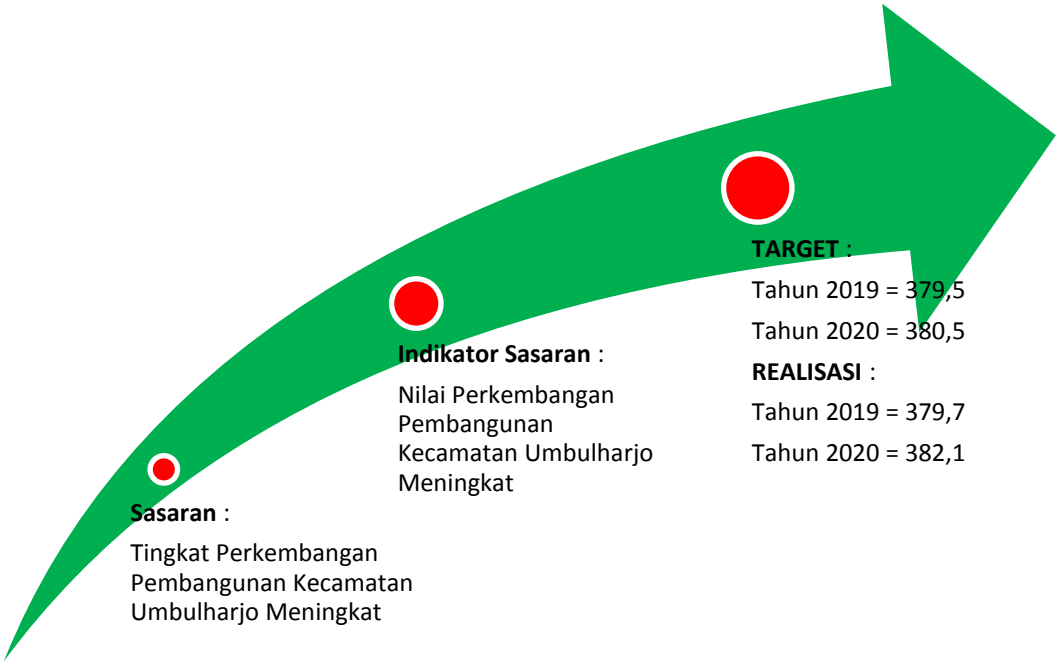

Tingkat perkembangan pembangunan di Kecamatan Umbulharjo dinilai melalui evaluasi perkembangan di tujuh kelurahan. Evaluasi perkembangan kelurahan itu sendiri dilakukan untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan. Hal itu sejalan dengan agenda kegiatan pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah kementrian dalam negeri tentang kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan secara nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015. Sehingga dapat diartikan pula bahwa pengukuran sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo sudah mengacu dan merujuk pada standart nasional tentang nilai perkembangan desa dan kelurahan.

Data kinerja kementrian dalam negeri tentang perkembangan pembangunan desa dan kelurahan, ditetapkan standar secara nasional 3 (tiga) kategori hasil evaluasi kelurahan dengan rentang nilai-nilai sebagai berikut :

1. Kelurahan dengan kategori hasil **Cepat Berkembang** dengan rentang nilai diatas atau sama dengan 351
2. Kelurahan dengan kategori hasil **Berkembang**dengan rentang nilai 201 sampai dengan 350
3. Kelurahan dengan kategori hasil **Kurang Berkembang** dengan nilai dibawah atau sama dengan 200

Kecamatan Umbulharjo melaksanakan evaluasi kelurahan, dengan metode perbandingan hasil penilaian mandiri dari parameter yang sudah ditentukan pada kondisi tahun 2018 dan 2019. Penilaian dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Berikut data hasil evaluasi kelurahan tahun 2020 di Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 12
Hasil Penilaian Perkembangan Kelurahan Tahun 2020

No	Nama Kelurahan	Nilai	Kategori
1	Semaki	385	Cepat berkembang
2	Muja-Muju	380	Cepat berkembang
3	Warungboto	393	Cepat berkembang
4	Tahunan	381	Cepat berkembang
5	Pandeyan	380	Cepat berkembang
6	Sorosutan	377	Cepat berkembang
7	Giwangan	379	Cepat berkembang
	Jumlah Nilai	2.675	

Tabel 13

Instrumen Analisa Perkembangan

No	Bidang	Instrumen Pengungkap
1	Pemerintahan	Pemerintahan
		Kinerja
		Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat
		Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*
		Pelestarian adat dan budaya
2	Kewilayahan	Inovasi
		Tanggap dan siaga bencana
		Pengaturan investasi.
3	Kemasyarakatan	Partisipasi masyarakat
		Lembaga kemasyarakatan
		Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
		Keamanan dan ketertiban
		Pendidikan
		Kesehatan
		Ekonomi;
		Penanggulangan kemiskinan
		Peningkatan kapasitas masyarakat.

Penilaian dan evaluasiperkembangankelurahandilaksanakandenganmetodepenilaianmandirimelaluiisianformulirinstrumenpengungkap yang kemudiandilakukanverifikasi di lapangan oleh

Tim tingkat kecamatan berupa penilaian administrasi, wawancara Lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat. Hasil penilaian dan evaluasi kemudian dituangkan dalam berita acara yang sekaligus menjadi laporan kegiatan kecamatan ke Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa tujuh kelurahan di Kecamatan Umbulharjo masuk pada kategori cepat berkembang dengan nilai rata-rata yang diperoleh kelurahan berada diatas 350.

Pengukuran capaian sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo dilakukan dengan cara menghitung jumlah nilai hasil evaluasi dari tujuh kelurahan, kemudian dibagi jumlah kelurahan.

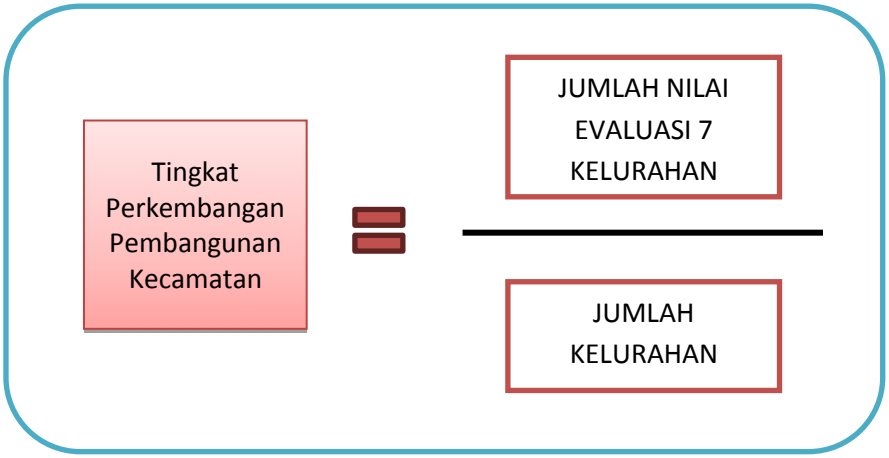

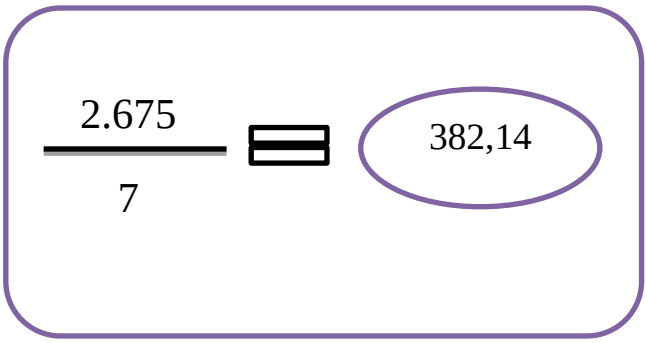

3.2. Analisa CapaianSasaran Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020

Perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo untuk kurun waktu 2017 – 2020 telah sesuai seperti yang direncanakan baik pada target maupun tujuan yang dirumuskan pada RencanaStrategis (Renstra).

Grafik 3

Nilai Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo

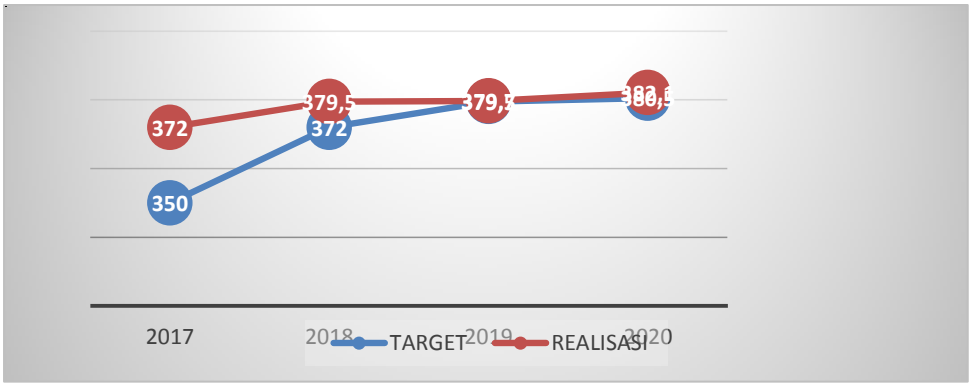

Tabel 14

ProsentaseCapaian Kinerja Strategis

Tahun	Target	Capaian	Prosentase
2017	350	372	106,28%
2018	372	379,5	102,01%
2019	379,5	379,8	100,07%
2020	380,5	382,14	100,43%

Grafik 3 di atas memperlihatkan kenaikan pada tingkat realisasi, hal tersebut menunjukkan bahwa **pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat**, dan peningkatan tersebut memang mengindikasikan perkembangan pembangunan di wilayah. Indikator keberhasilan perkembangan pembangunan terlihat pada tingka keberdayaan masyarakat di 3 aspek utama yaitu :

1. Pembinaankelompokmasyarakat
2. Peningkatansaranaprasarana wilayah
3. Pengembanganpotensi wilayah

Pada BAB II dalam abel 4 sudah dijelaskan tentang kesesuaian program dan kegiatan yang ada pada RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo. Namun demikian pada tahun 2020 ini terjadi bencana yang bersifat nasional bahkan internasional yaitu wabah penyakit pandemi corona covid 19. Bencana tersebut sangat berpengaruh terhadap kuwalitas pencapaian sasaran, sehingga mengharuskan Kecamatan Umbulharjo menetapkan Langkah mana saja yang menjadiperhatianutamapencapaiansasaran.

PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

1. Penguatan Program GandengGendong

   Difokuskan untuk menambah jumlah pelaku kuliner melalui pelatihan kuliner berkelanjutan.

Tabel 15

Jumlahpelakukuliner yang terbina

Tahun	Pelakubaru	Pelakulanjutan	Jumlah
2018	67	-	67
2019	81	56	137
2020	56	102	158

Beberapa pelatihan yang terselenggara yaitu, pelatihan pengolahan makanan berbahan ikan lele yang dikembangkan menjadi abon. Pelatihan ini sudah sampai pada tahap pengemasan dan managemen usaha. Pengolahan ikan lele menjadi komoditi produk makanan terlaksana di wilayah Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Tahunan. Pelatihan makanan jajan pasar seperti lemper, pastel, bermacam kue basah dan lainnya untuk memenuhi ebutuhan snack terutama dilingkungan kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui aplikasi Nglarisi. Pelatihan tersebut tersebar di semua kelurahan Kecamatan Umbulharjo. Pelatihan membuat tempe dan olahannya, yang dilaksanakan sebagai upaya menangkap potensi kelompok pengrajin tempe di Kelurahan Pandeyan. Pengembangan lebih lanjut pada pelatihan abon nabati di Kelurahan Giwangan, yaitu produk unggulan berupa pemanfaatan buah kluwih yang diolah menjadi abon. Pengembangan produkini, masih berkisar pada upaya promosi produk di tingkat Kecamatan.

2. PenguatanKelompokPengrajin

Pembinaan kelompok pengrajin batik, menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat. Setelah batik jumputan, pada tahun ini sudah dikembangkan motif batik ibori dan perpaduan antar keduanya. Salah satukelurahan yang focus terhadap kerajian batik yaitu Kelurahan Tahunan. Pembinaan pengrajin batik di Kelurahan Tahunan sudah sampai pada managemen usaha dan menawarkan produk sampai keluar wilayah Kota Yogyakarta. Salah satu kegiatan pendukung yaitu rutin dilaksanakan kegiatan Jogja Heboh berupa pameran utama hasil kerajinan batik jumputan, disamping menampilkan potensi lainnya sebagai pendukung. Selaras dengan halitu, KelurahanSemaki juga merintis pengrajin batik tulis khas jogja. Hal ini dikhususkan sebagai bentuk penyelamatan budaya asli yang harapannya dapat bersaing dengan inovasi-inovasi batik secara nasional.

Tabel 16

Jumlahpembinaankelompokpengrajin batik

Kelurahan	2018	2019	2020
Tahunan	5	7	11
Semaki	2	4	4
Sorosutan	-	2	2

3. Penguatan program KetahananPangan

Pada sektorini, Kecamatan Umbulharjo masih focus terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelompok-kelompok peternak ikan dan pemanfaatan lahan sebagai Lorong-lorong sayur dan buah. Wilayah perkotaan dengan lahan pertanian dan bahkan perikanan yang tidak mungkin ada, bukan menjadi kendala utama penguatan program ketahanan pangan. Kecamatan Umbulharjo bersinergi dengan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta melaksanakan penguatan dan pembinaan kelompok tani, khususnya kelompok wanita tani (KWT) yang menjadi bagian dari pembinaan gapoktan wilayah. Memang hal itu menjadi target sasaran Dinas Pertanian Kota Yogyakarta, namun Kecamatan Umbulharjo berperan penting dalam upaya pemberdayaan masyaraka untuk ikut serta melakukan kegiatan yang menjadi program ketahanan pangan, seperti penanaman

sayuran di Lorong-lorong gang, atau di halaman rumah dengan metode hidroponikdan penanaman pada polybag. Pembuatan Lorong-lorong sayur dan buah, menjadi kegiatan utama diseluruh kelurahan Kecamatan Umbulharjo. Salah satu elurahan yang sudah sampai pada taraf pembuatan cluster yaitu Kelurahan Giwangan, dimana wilayah Kampung Sanggrahan menjadi cluster tanaman klengkeng, dan Kampung Mendungan Giwangan menjadi cluster tanamananggur. Kedua jenis kegiatan itulah yang terus dibina untuk tidak saja memenuhi kebutuhan mandiri wilayah, namun bagaimana bisa menopang sector pariwisata lokal yang juga sedang dikembangkan. Program Lele cendol, masih dilakukan terus sebagai upayap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan sektor ekomomi pendapatan. Kelurahan Pandeyan, mampu menjadi wilayah unggulan dalam pengelolaan perikanan perkotaan dengan lele cendol. Pada tahun 2020 ini, pengembangan sector perikanan lele cendol masih pada taraf pemenuhan kebutuhan local, seperti yang menjnadi tujuan awal ari program lele cendol Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain KelurahanPandeyan, pelaksanaan program lele cendol juga dilaksanakan di seluruhkelurahanKecamatanUmbulharjo.

Tabel 17

Jumlahlokasi Lorong sayur dan lele cendol

Tahun	Lorong sayur	Lorong buah	Ikan / Lele Cendol
2018	24	2	2
2019	56	4	34
2020	61	4	37

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Sarana dan prasarana menjadihal penting dalam mengukur tingkat perkembangan pembangunan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuwantitas dan kuwalitas merupakan keberhasilan pemerintah dalam membangun wilayah. Kecamatan Umbulharjo masih fokus pada pembangunan jalan melalui konblokisasi dan perkerasan jalan. Selain pembangunan jalan, Kecamatan Umbulharjo juga fokus pada pemeliharaan saluran air hujan. Hal itu sangat penting karena wilayah yang merupakan wilayah hunian padat, sehingga permasalahan genangan air hujan bahkan banjir masih menjadi perhatian utama. Selain jalan dan saluran air hujan, tidak

kalah penting yaitusumur peresapan air hujan, yang menjadi modal peningkatan sumber air bersih perkotaan.

Tabel 18

Jumlahpeningkatansrana dan prasarana wilayah

Tahun	Jalan	SAH	SPAH
2018			
2019			
2020			

PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH

Potensi adalah suatu daya, kemampuan dan kekuatan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Kecamatan Umbulharjo mempunyai banyak potensi yang terus digali menjadi inovasi dan daya dukung keberhasilan pembangunan wilayah. Sesuai dengan isustrategis kewilayahan, beberapa potensi di Kecamatan Umbulharjo yaitu potensi alam sungai Gajah Wong, potensi budaya dengan 2 rintisan kelurahan budaya, potensi kerajinan batik, kerajinan logam dan kuningan, potensi edukasi dan kultur sejarah Situs Warungboto, serta makam Ki Hajar Dewantara.

Perkembangan pengelolaan potensi wilayah secara diskriptif dapat disampaikan berikut :

1. Taman Legawong

   Berada di wilayah Gambiran Kelurahan Pandeyan. Sampai dengan tahun 2020 taman Legawong masih berbenah pada pengelolaan sarana dan prasarana. Minat kunjungan masih menjadi buah pemikiran pemerintah untuk dikembangkan lebih luas lagi tidak hanya bersifat lokal. Penambahan fasilitas gazebo dan juga wifi menjadi pilihan yang strategis untuk menarik minatk unjungan. Wujudnya memang masih sederhana sebagai ruang terbuka publik, sehingga pengembangan menjadi sebuah tempat wisata masih menjadi pekerjaan yang tertunda bagi masyarakat sebagai subyek dan pemerintah sebagai fasilitator.

2. Taman Pleretan

   Berasa di daerah aliran Sungai Gajah Wong yang masuk di wilayah Kelurahan Giwangan. Taman ini semula merupakan tempat kumuh yang kemudian menjadi

program revitalisasi daerah kumuh perkotaan. Pemerintah bersama masyarakat kemudian berkonsep mengenai pembangunan ruang publik yang dapat dimanfaatkan tidak saja oleh masyarakat lokal, tetapi juga warga Yogyakarta pada umumnya. Pada tahun 2020 ini Taman Pleretan sudah menjadit empat kunjungan para pesepeda. Pembenahan terus dilakukan termasuk penambahan gazebo dan kolam ikan. Khusus di Taman Pleretan ini, kolam ikan menjadi focus budidaya ikan nila dan lele di Kampung Mrican. Hal itu menjadi salah satu bentuk pengembangan potensi sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pengembangan budidaya ikan tersebut akan terus dikelola untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung.

3. Wisata Air TirtoWolulas

   Berada di daerah aliran sungai Gajah Wong di wilayah Kelurahan Giwangan Kampung Ponggalan. Tempat ini bersebelahan dengan Taman Pleretan di Kampung Mrican, namun pola pengembangannya berbeda. Di Tirto Wolulas potensi dikembangkan pada pemanfaatan aliran sungai, dengan wisata prahu menyusuri sungai. Konsep yang dikembangkan adalah sungai yang bersih, nyaman dan bersahabat. Minat kunjungan sudah luas sampai keluar wilayah Kota Yogyakarta. Berbagai pembenahan untuk kenyamanan pengunjung juga dilakukan termasuk konsep kuliner soto bathok. Pada tahun 2020 ini, pemerintah Bersama masyarakat sedang merintis kelompok sadar wisata untuk mulai mengawal pengembangan lebih lanjut. Sehingga pemberdayaan masyarakat benar-benar menjadi pilihan yang harus dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Situs Warungboto

   Berada di wilayah Kelurahan Warungboto dan disebut sebagai wisata situs sejarah. Pengembangan situs ini memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Kecamatan Umbulharjo ingin memanfaatkan keberadaan situs sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat lokal. Pada tahun 2019 sudah mulai terkonsep satu kegiatan adat tradisi Merti Tuk Umbul. Konsep adat trades iini dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, melalui suatu pagelaran pawai budaya. Masyarakat dan pemerintah mencoba menggali keberadaan situs melalui sejarah yang kemudian menemukan petunjuk bahwa bangunan tersebut masih menjadi bagian

dari Keraton Yogyakarta. Sehingga pengembangan adat tradisi sangat pas menjadi pilihan yang rutin akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Taman Edukasi Makam Ki Hajar Dewantara

   Berada di Kampung Bathikan Kelurahan Tahunan. Sebuah potensi tempat yang sampai dengan saat ini masih menjadi buah pemikiran masyarakat dan pemerintah untuk dilakukan pengembangan. Makam memang hanya sebuah tempat yang dikunjungi untuk berziarah, namun ziarah di tempat ini bukan sekedar ziarah biasa, karena makam di tempat ini adalah makam pahlawan besar yang dapat menjadi tempat edukasi sejarah. Pada tahun 2019 dan 2020 Kecamatan Umbulharjo sudah mulai merintis pengembangan tempat tersebut menjadi sebuah tempat wisata religi dan edukasi sejarah. Saat ini sedang diupayakan penataan kawasan menjadi sebuah taman public terbuka dan hijau, sehingga bisa menarik minat kunjungan dan tentu saja sejalan dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui potensi kerajinan batik jumputan.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN

Keberhasilan pencapaian target perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo tidak lepas dari faktor pendukung dan factor penghambat. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan yaitu :

1. Penentuan sasaran dan target yang tepat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Umbulharjo
2. Penentuan indikator kinerja yang tepat terhadap sasaran dan target
3. Respon yang cepat terhadap isu-isu strategis
4. Penentuan strategi melalui program dan kegiatan yang fokus pada potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat
5. Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan
6. Membangun kemitraan antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, perusahaan melalui CSR

Sedangkan factor penghambat yaitu :

1. Bencanapandemicovit 19
2. Rasionalisasianggarankarenabencanapandemicovit 19

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Program Kecamatan Umbulharjo

Gambar 5

Sasaran Program KecamatanUmbulharjo

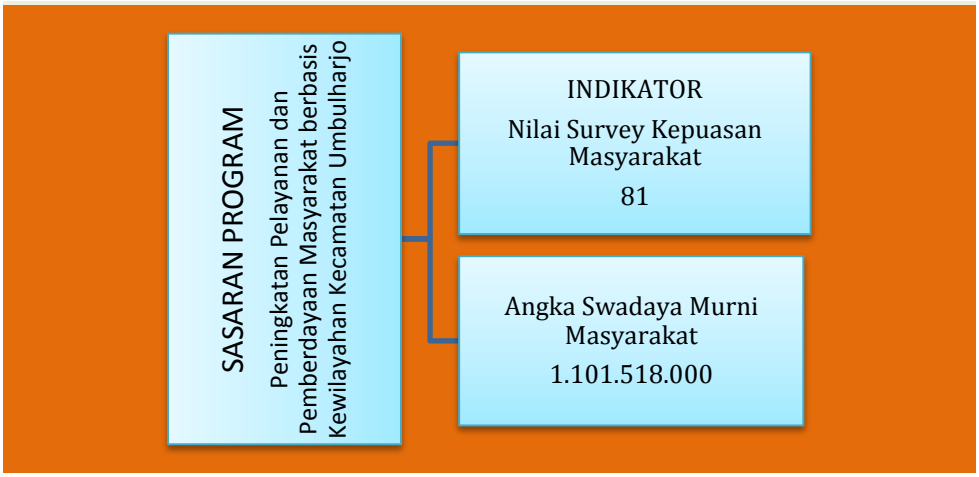

Sasaran Perangkat Daerah, harus didukung dengan Program yang menjadi prioritas utama. Penentuan program yang tepat merupakan kunci utama keberhasilan perangkat daerah mencapai target yang ditetapkan pada sasaran dimaksud. Kecamatan Umbulharjo mempunyai 1 (satu) program yang menjadi prioritas yaitu **Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo.**

INDIKATOR NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Salah satu tugas Kecamatan Umbulharjo adalah penyelenggaraan pelayananpublik. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyelenggara pelayanan public harusmelaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhada kinerja pelaksana di lingkup organisasi. Kecamatan Umbulharjo melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu di Bulan Juni. Evaluasi tersebut dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kecamatan Umbulharjo melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui instrumen questioner. Ada 9 (Sembilan) unsur yang menjadi kunci penilaian yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya dan atau tariff
5. Produkspesifikasijenispelayanan
6. Kompetensipelaksana
7. Perilakupelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Tabel 15

Laporan SKM KecamatanUmbulahrjoTahun 2020

No	UnsurPelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,310
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,440
3	Waktu Pelayanan	3,330
4	Biaya/Tarif	3,270
5	ProdukSpesifikasiJenisPelayanan	3,260
6	KompetensiPelaksana	3,240
7	PerilakuPelaksana	3,400
8	PenangananPengaduan, Saran dan Masukan	3,210
9	Sarana dan Prasarana	3,360
NILAI RATA-RATA		3,280
Ikm Unit Pelayanan		82,01
MutuPelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		BAIK

Analisa terhadapcapaianyaitu :

Secara kuwantitatif angka 82,01 berada pada mutu pelayanan yang baik, dan target tercapai optimal karenalebihdari 100% sebagaimana dapat dilahat dari tabel di bawah ini.

Sedangkan secara kuwalitatif dapat dijelaskan adanya nilai lebih, sehingga angka tercapai optimal. Unsur pelayanan persyaratan sudah semakin jelas dan terpublikasi dengan baik melalui website dan media cetak seperti baner dan leaflet. Pada unsure pelayanan mekanisme dan prosedur, perkembangan model dan metode pelayanan juga sudah diikuti SOP yang jelas yang sudah dipublikasikan melalui media informasi website. Perkembangan metode dan prosedur pelayanan terutama PATEN sudah beralih melalui aplikasi, tidak lagi mengutamakan tatap muka dengan petugaspelayanan di kantor kecamatan. Hal itu berakibat pada unsur waktu pelayanan yang makin singkat dan menjadi hal yang mendapat apresiasi dari masyarakat.

Unsur pelayanan pada kompetensi pelaksana masih belum memberikan kuwalitas yang maksimal, hal itu terlihat dari nilai yang berada pada ring rendah disbanding unsure lainnya. Keterbatasan personil, masih menjadi kendala utama, namun hal itu disikapi dengan solusi evaluasi berkala tentang pelaksanaan pelayanan di kelurahan dan kecamatan. Sehingga evaluasi memberikan nilai lebih terhadap perubahan kompetensi pelaksana kearah yang lebih baik.

Pada unsure penanganan pengaduan, nilai yang diperoleh belum optimal seperti yang diinginkan. Kendala utama adalah SOP yang belum tersosialisasikan dengan pihak pengampu aduan yang dalam hal ini seksi teknis SKPD. Sehingga penanganan aduan masih tertumpu pada kepala SKPD.

Tabel 16

Perbandingan Capaian Sasaran Program Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1	2017	80	80	100 %
2	2018	80,25	80,27	100,02 %
3	2019	80,50	81,59	101,35 %
4	2020	81	82,01	101,24 %

Analisa realisasi sasaran program dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan dari tahun pertama, kedua ketiga dan keempat. Realisasi mencapai lebih dari 100 % yang menjadi indikasi perbaikan pelayanan dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor pendukung berhasilnya capaian pada indikator ini, yaitu :

1. Standar Oparasional Prosedur yang jelas
2. Motto Melayani Secepat Mungkin dan tanpa biaya
3. Informasi yang up to date melalui sarana media elektronika atau media cetak
4. Pelayanan Pengaduan Langsung dan melalui media elektronika
5. Tindal lanjut koordinasi lintas sektor terkait pengaduan
6. Sarana dan prasarana yang memadai

INDIKATOR ANGKA SWADAYA MURNI MASYARAKAT

Swadaya murni adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat baik berupa daya maupun dana untuk mewujudkan suatu pembangunan fisik maupun non fisik yang pengadaannya seluruhnya oleh masyarakat itu sendiri, karena didorong kepentingan, dibiayai dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dimanfaatkan dan dipelihara pula oleh masyarakat.

Swadaya murni ini sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat karena angka swadaya tersebut menunjukkan peran dan partisipasi langsung masyarakat sehingga apabila angka swadaya masyarakat tinggi, maka akan dikategorikan tingkat keberdayaannya tinggi.

Pada tahun 2020 Kecamatan Umbulharjo menetapkan target angka swadaya pada angka 1.101.518.000 rupiah, dengan asumsi bahwa swadaya masyarakat berada dikisaran 10% dari jumlah pagu dana kelurahan pada tahun bersangkutan.

Tabel17

Target dan Capaian Angka Swadaya MurniMasyarakat Tahun 2020

No	Nama Kelurahan	Target angkaswadaya	Realisasiswadaya Masyarakat	Capaian
1	Tahunan	143.404.000	725.583.500	505,9 %
2	Warungboto	137.373.000	153.990.000	112,09 %
3	Muja-Muju	155.497.000	168.380.000	108,28 %
4	Giwangan	160.224.000	250.920.000	156,60 %
5	Sorosutan	172.626.000	660.040.000	392,54 %
6	Pandeyan	168.249.000	420.840.000	250,12 %
7	Semaki	164.145.000	418.460.000	254,93 %
		1.101.518.000	2.798.213.500	254,03%

Analisa Capaian Sasaran Program Indikator Angka SwadayaMurni Masyarakat

Angka swadaya murni masyarakat tahun 2020 mencapai 254,03% dari yang ditargetkan. Secara kuantitatif target tercapai secara optimal lebih dari 100%. Hasil dariverifikasi laporan swadaya masyarakat, tercatat bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai masyarakat, dari dan oleh masyarakat dilaporkan menjadi angka swadaya murni. Indikasi utama dari hasil yang diperoleh yaitu bahwa didalam masyarakat tingkat keberdayaannya

tinggi. Angka swadaya murni yang tinggi mencerminkan masyarakat yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Penentuan indicator angka swadaya ini adalah kali pertama melalui revieuwRenstra di tahun 2020.

Analisa Realisasi Angka Swadaya murnimasyarakat

1. Bencana pandemic covit 19 merupakan salah satu indikasi kuat penyebab angka swadaya masyarakat tinggi. Bencana bersifat dadakan atau tiba-tiba, sehingga berbagai bentuk program penanggulangannya pun tidak serta merta langsung ada dari pemerintah. Masyarakat dituntut untuk dapat berswadaya bahu membahu membantu dan mencukupi kebutuhan wilayah masing-masing. Terlihat pada munculnya program Mbagehi Ngluwihi di seluruh kelurahan, tanggap bencana dengan kegiatan pencegahan mandiri wilayah melalui peran Kampung Tangguh Bencana, kelurahan siaga, dan juga peran kader PKK di wilayah.
2. Secara kuwalitatif masih dibutuhkan SOP pengumpulan data swadaya murni masyarakat, sehingga ada pembatasan yang jelas tentang terkait angka swadaya murni yang benar menunjukkan tingka tkeberdayaan masyarakat.

3.4. CAPAIAN DAN ANALISA KEUANGAN

Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan anggaran berbasis kinerja, artinya penyusuna nanggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

Anggaran tahun 2020 Kecamatan Umbulharjo terdiri dari Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pendapatan Kecamatan Umbulharjo di tahun 2020 ini nihil, sejalan dengan program gratis pelayanan, sehingga semula pendapatan diperoleh dari retribusi pelayanan perizinan, sekarang tidak ada. Belanja tidak langsung merupakan belanja gaji pegawai. Belanja langsung Kecamatan Umbulharjo terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Grafik4

Anggaran pada BelanjaLangsung

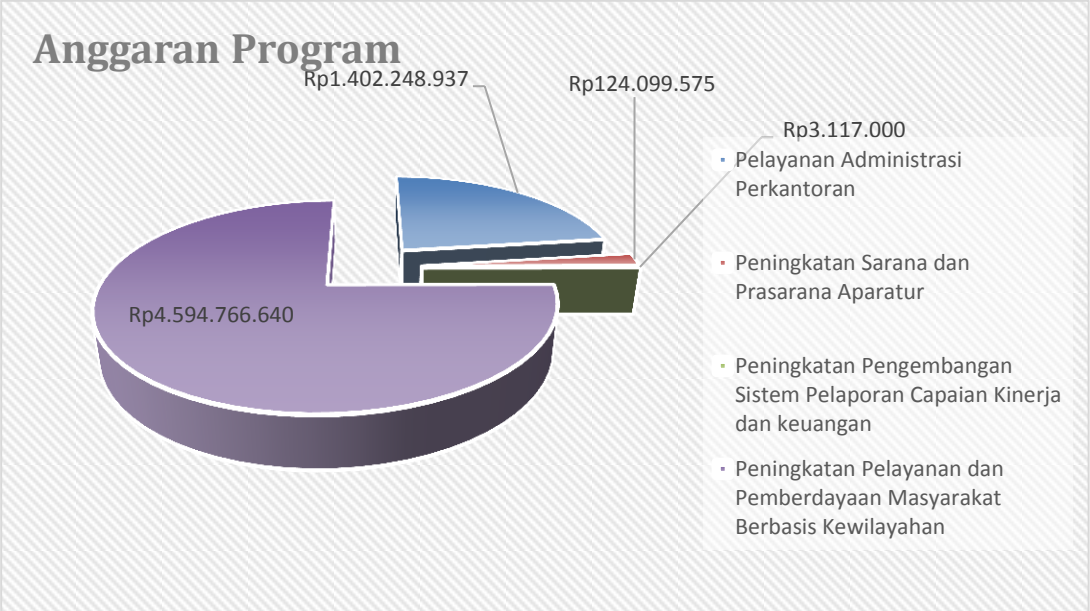

Anggaran tahun 2020 Kecamatan Umbulharjo berjumlah Rp. 6.124.232.152,00 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) nomor 33/DPPA-SKPD/2020 dan disahkan tanggal 23 Oktober 2020.

Tabel 18

Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	94.125.000
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.308.123.937
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	85.878.575
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.221.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	3.117.000

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Kegiatan PenyelenggaraanPemerintahan, KetentramandanKetertibanKecamatanUmbulharjo	60.098.000
	KegiatanPenyelenggaraanPelayanan, Informasi, danPengaduanMasyarakatKecamatanUmbulharjo	28.899.820
	KegiatanPembinaanSosialdanBudayaMasyarakatKecamatanUmbulharjo	89.276.000
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahanGiwangan	619.253.000
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahanSorosutan	601.892.820
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahanPandeyan	554.051.000
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahanWarungboto	574.315.000
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahanTahunan	615.087.000
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahan Muja-Muju	560.573.000
	KegiatanPembinaanEkonomi, SosialdanBudayaMasyarakatKelurahanSemaki	713.126.000
	KegiatanPenyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	178.195.000

Grafik 5

Perbandingan Anggaran

Perbandingan anggaran dari 2018, 2019 daan 2020 jelas terlihat ada penurunan. Seharusnya pagu Kecamatan Umbulharjo 2020 khususnya untuk sasaran strategis meningkat dari tahun 2019, seiring dengan pengelolaan dana kelurahan yang menjadi amanat undang-undang. Namun realitanya yaitu adanya bencana pandemic covit 19 yang menyebabkan perubahan anggaran untuk difokuskan pada penanganan bencana dan bukan menjadi ewenangan Kecamatan, melainkan BPBD (Badan Penanganan Bencana Daerah)

Berbanding terbalik dengan paguanggaran yang menurun, namun angka swadaya murni masyarakat meningkat, sehingga tetap ada relevansi dari pencapaian target yang optimal. Hal ini membuktikan juga bahwa ketersediaan anggaran memang penting, walau tidak menjadi factor dominan.

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

Grafik 6

Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

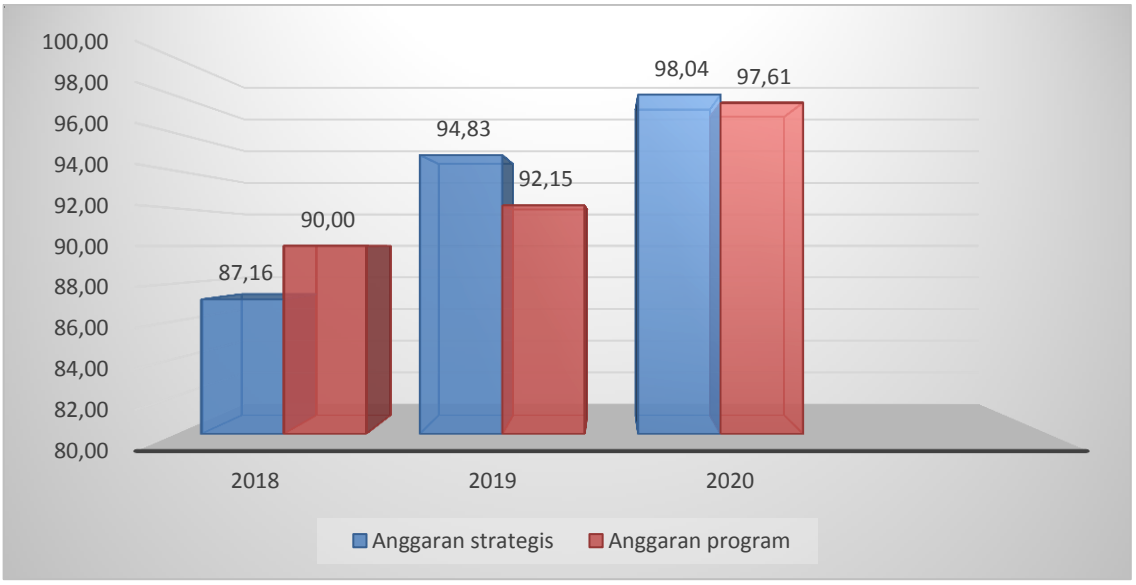

Bahwa keselurahan anggaran Kecamatan Umbulharjo menjadi factor pendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan juga sasaran program yang terjabarkan dalam 3 (tiga) program internal dan 1 (satu) program eksternal yang menjadi strategi perangkat daerah.

Dari tahun 2018 Kecamatan Umbulharjo selalu maksimal di dalam penyerapan anggaran kegiatan, dengan prosentase diatas 90%. Pada table di atas terlihat bahwa serapan anggaran semakin mendekati 100%. Hal ini dapat dianalisa bahwa pengelolaan anggaran sudah semakin baik. Adapun peningkatan didukung dengan beberapa factor yaitu :

1. Penyusunan tata kala dan rencana aksi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran kegiatan.
2. Penyusunan system pengendalian internal pemerintah yang sekaligus mencakup rencana tindak pengendaliannya
3. Desk timbal balik capaian fisik dan keuangan setiap 3 bulan
4. Evaluasi dan koordinasi rutin pelaksanaan kegiatan anggaran
5. Revieuw SOP pengelolaan keuangan dan kegiatan

Faktorpenghambatantaralain :

1. Penundaan beberapa kegiatan dari tata kala karena bencana pandemic covit 19 yang melanda di akhirtribulan 1.
2. Masih terdapat kekurangan jumlah sumber daya manusia, sehingga dobel tugas dan fungsi masih terjadi.

Tabel19

Realisasi Capaian Kinerja Anggaran dan Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo	100,43 %	98,04 %	2,39 %
2	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan kecamatan Umbulharjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	101,24 %	97,61 %	3,79 %

Analisa Realisasi Sasaran Terhadap Capaian Kinerja Anggaran dan Efisiensi

Prosentase capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo tahun 2020 mencapai 100,43%, dengan realisasi anggaran mencapai 98,04%, artinya selisih dari realisasi capaian tersebut menjad isuatu efisiensi pelaksanaan anggaran. Analiasanya bahwa tercapainya target lebih dari 100% dengan pemanfaatan anggaran yang dapat ditekan diangka 98,04 sudah dapat merealisasikan target dan bahkan tercapa lebih dari yang ditargetkan. Logikany abahwa target 100% maka pemanfaatan anggaran juga 100%, namun efisiensi berlaku sehingga pemanfaatan anggaran kurang dari 100% untuk pencapaian target lebih dari 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

1. Adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa
2. Pemanfaatan teknologi sebagai media pendukung kelancaran kegiatan, tentunya akan mengurangi beban belanja
3. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat secara berkesinambungan terhadap program dan kegiatanmelaluiswadayamasyarakat
4. Kemitraan pemerintah dengan lembaga swadaya, lembaga pendidikan dan perusahaan melalui CSR.

1.6. INOVASI KECAMATAN UMBULHARJO

Inovasi adalah suatu ide, gagasan tentang hal baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses dan jasa. Definisi inovasi memang banyak dan dibuat dari berbagai sudut pandang. Namun Kecamatan Umbulharjo memilih arti dari inovasi yaitu, pengembangan ide dan kreatifitas dengan memanfaatkan modal dan potensi yang ada untuk membuat suatu produk yang dapat dimanfaatkan.

Kecamatan Umbulharjo mempunyai 1 (satu) inovasi bidang pelayanan pada tahun 2020 ini, yaitu ***masuk satu keluar empat***. Inovasi tersebut berupa permohonan penambahan anggota keluarga melalui proses kelahiran, yang Ketika proses memasukkan data, maka ekaligus akan mendapatkan KartuKeluarga, AkteK elahiran, Kartu Identitas Anak (KIA)

Disamping itu, terdapat inovasi yang berasal darimasyarakat, yaitu

1. DermagaCinta dan BendungLepen

   Inovasi masyarakat tentang pemanfaatan daerah aliran Sungai Gajah Wong yang berada di Kampung Ponggalan dan Mrican Kelurahan Giwangan.

3. Dapu rUmum Mbagei Lumbung Pangan peduli covit 19

   Inovasi masyarakat tentang kepedulia social dimasa bencana pendemi covit 19. Inovasi tersebut dilaksanakan di wilayah Kelurahan Tahunan dengan bentuk pembagian nasi bungkus kepada pihak yang terdampak covit 19.

   Inovasi masyarakat tentang kepedulian social dimasa bencana pendemi covit 19. Inovasi tersebu tdilaksanakan di wilayah KelurahanTahunan

4. Kampung SayurPeduli

   Inovasi masyarakat terkait kepedulian social dimasa bencana pandemic covit 19. Inovasi yang digagas di Kelurahan Semaki dan menjadi sarana pemanfaatan hasil kebun sayur yang menjadi program pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke empat dari Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Hasil laporan kinerja Kecamatan Umbulharjo tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo di tahun 2020 ***meningkat*** dengan capaian 100,4%.
2. Strategi program yang dilaksanakan dalam upaya mencapai perkembangan pembangunan berhasil dengan baik. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo mempunyai 2 (dua) indikator yang menjadi penentu keberhasilan. Pada indikator survey kepuasan masyarakat prosentase capaian tercapai 101,24%. Pada indicator angka swadaya murni masyarakat prosentase tercapai 254,03%
3. Penyerapan anggaran tahun 2020 tercapai 98,04% dan masuk pada kategori sangat tinggi. Penyerapan anggaran yang tinggi masih terdapat efisiensi anggaran terhadap hasil capaian sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo sebesar 2,36%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Adanya beberapa SDM yang handal
3. Adanya semangat kerja yang baik
4. Lingkungan kerja yang kondusif
5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan
8. Rencana aksi telah disusun.

Faktor-Faktor penghambat atau kendala-kendala dalam upaya pemenuhan target antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
3. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat
4. Bencanapandemicovit 19

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurai permasalahan dan kendala-kendala di wilayah :

1. PengutamaanForum Kampung sebagai mitrapembangunan wilayah
2. LPMK sebagai Koordinator tingkat kelurahan
3. Pemanfaatan teknologi sebagai media di era keterbukaan, dengan tidak meninggalkan peran masing-masing sektor
4. Memfungsikan Lembaga di wilayah sebagai sektor pendukung keberhasilan
5. Pembagian beban kerja, yang tidak sekedar memperhatikan tugas pokok masing-masing aparatur. Artinya bahwa beban pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama pada unit kerja (kelurahan) dan atau perangkat kerja (kecamatan), dan berprinsip bahwa semua informasi harus dikuasai sebagai aparatur.
6. Monitoring capaian fisik dan keuangan setiap bulan
7. Evaluasi capaian kegiatan melalui desk timbal balik setiap triwulan
8. Peningkatan kegiatan koordinasi internal untuk mensikapi cepatnya informasi dan segala permasalahan yang harus di selesaikan.
9. Pembaruan SOP di semua sektor karena dinamika yang begitu cepat
10. Pemanfaatan SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, Kecamatan Umbulharjo mempunyai beberapa langkah yaitu :

1. Memperbaiki basic data wilayah, melalui penyusunan dokumen perencanaan wilayah yang terintegrasi dengan potensi yang berbeda.
2. Mengintensifkan koordinasi internal dan evaluasi kegiatan dalam bentuk desk timbal balik realisasi fisik dan keuangan, sebagai upaya monitoring kinerja terhadap capaian yang sudah ditargetkan sesuai tata kala
3. Mentertibkan penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan seperti tata kala, kerangka acuan kerja, dan rencana tindak pengendalian kegiatan

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada jajaran pegawai melalui evaluasi laporan realisasi kegiatan sesuai yang diperjanjikan pada peranjian kinerja
5. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan pengusaha terkait inovasi wilayah
6. Mengoptimalkan fungsi dan peran kampung sebagai pendamping LPMK dalam mengkoordinasikan pembangunan di wilayah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020 yang disajikan dengan segala keterbatasan. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Kecamatan Umbulharjo terdapat keberhasilan dan kekurangan yang ada, untuk itu kekurangan ini perlu didukung dengan potensi organisasi yang ada, termasuk komponen Seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.